H. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025 - 2029

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PEMERINTAHAN KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan kurniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Renstra ini mengacu pada dokumen RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan pendekatan teknokratis, dimana penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Payakumbuh pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dimasa yang akan datang pada khususnya.

Payakumbuh, 19 September 2025
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

DONISA PUTRA, S.Sos
Pembina TK I
NIP. 19740602 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 42
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 50
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 50
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 53
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 60
BAB V PENUTUP 106
LAMPIRAN : 1. META DATA INDIKATOR
2. MANAJEMEN RESIKO
3. POHON KINERJA
4. KERTAS KERJA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Kepegawaian Tahun 2020-2024	13
Tabel 2.2	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan P3K Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin	14
Tabel 2.3	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan P3K Berdasarkan Pendidikan.	15
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	16
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	20
Tabel 2.6	Perkembangan Data Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	25
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	28
Tabel 2.8	Perkembangan Industri Tahun 2020-2024	31
Tabel 2.9	Data Industri dan Penggunaan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	32
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2020 - 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	36
Tabel 2.11	Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	49
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	52
Tabel 3.2	Penatahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	53
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	56
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	58
Tabel 4.1	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	61
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	79
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan	99
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	102
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	103
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Lainnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	105

GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi	12
Gambar 2.2	PNS dan P3K Berdasarkan Pangkat/Golongan	14
Gambar 2.3	PNS dan P3K Berdasarkan Pendidikan	15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai *development agent* yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial. Selanjutnya guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efesien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah. Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-PD sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun”.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD.

Mempedomani Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Pemerintah kota diamanahkan untuk menyusun dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Renja Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Payakumbuh, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian tugas dan fungsi Kota Payakumbuh.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil dan dampak (*outcome dan impact*) yang ingin dicapai selama kurun waktu dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Secara substansi, penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dilakukan dengan memperhitungkan kondisi dan potensi, permasalahan dan isu strategis wilayah yang kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan tahunan dalam rentang waktu pembangunan strategik daerah. Dengan harapan proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel dan terukur untuk menghasilkan pembangunan yang optimal dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.

Selain hal tersebut diatas, terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang penyusunan Renstra Dinas TenagaKerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pergantian Kepala Daerah dan Penyesuaian dengan Arah Kebijakan dan Program Prioritas Kepala Daerah;
2. Penyesuaian Rencana Pembangunan Daerah terhadap Perkembangan Situasi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi;
3. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Layanan Publik;
4. Pemenuhan Aspirasi Masyarakat.

Adapun pelaksanaan penyusunan Renstra ini disusun berpedoman kepada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renstra;
b. Penyusunan Rancangan Renstra;
c. Penyempurnaan Rancangan Renstra;
d. Penyampaian Rancangan Renstra ke Bappeda untuk diverifikasi;
e. Perbaikan hasil verifikasi Rancangan Renstra;
f. Penetapan Renstra.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010- 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68);
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 71);
28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Selain peraturan-peraturan diatas, penyusunan Renstra juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Kemendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 disusun untuk menjadi acuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Adapun maksud disusunnya penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah :

a. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
b. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam melaksanakan pembangunan sesuai tupoksi, kewenangan dan tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan program/kegiatan Dinas;
c. Sebagai tolok ukur bagi aparatur pelaksana, perencana maupun pengawasan dalam menganalisa dan mengevaluasi indikator kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah :

a. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
b. Sebagai acuan kerja dan pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sesuai tupoksi termasuk untuk mencapai sasaran di RPJMD;
c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
d. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
e. Sebagai acuan bagi pelaksanaaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Renstra Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN :
1. Metadata Indikator
2. Manajemen Resiko
3. Pohon Kinerja
4. Kertas Kerja

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan unsur pelaksana bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan unsur pelaksana bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
2. Pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris Dinas

Tugas Pokok :

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Program dan Keuangan.

3) Bidang Tenaga Kerja

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Tenaga Kerja;
b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Tenaga Kerja;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tenaga Kerja;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tenaga Kerja; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelatihan Tenaga Kerja;
b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

4) Bidang Perindustrian

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perindustrian.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Industri;
b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Industri;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Industri;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Pangan;

b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Sandang dan Kerajinan;
c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Logam, Elektronika, Kimia dan Bahan Bangunan.

5) UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)

Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibidang Pelayanan dan Pengembangan Rendang.

Fungsi :

a. Penggerakan pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
b. Penggerakan peran serta dan pemberdayaan IKM;
c. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Rendang di Kota Payakumbuh.

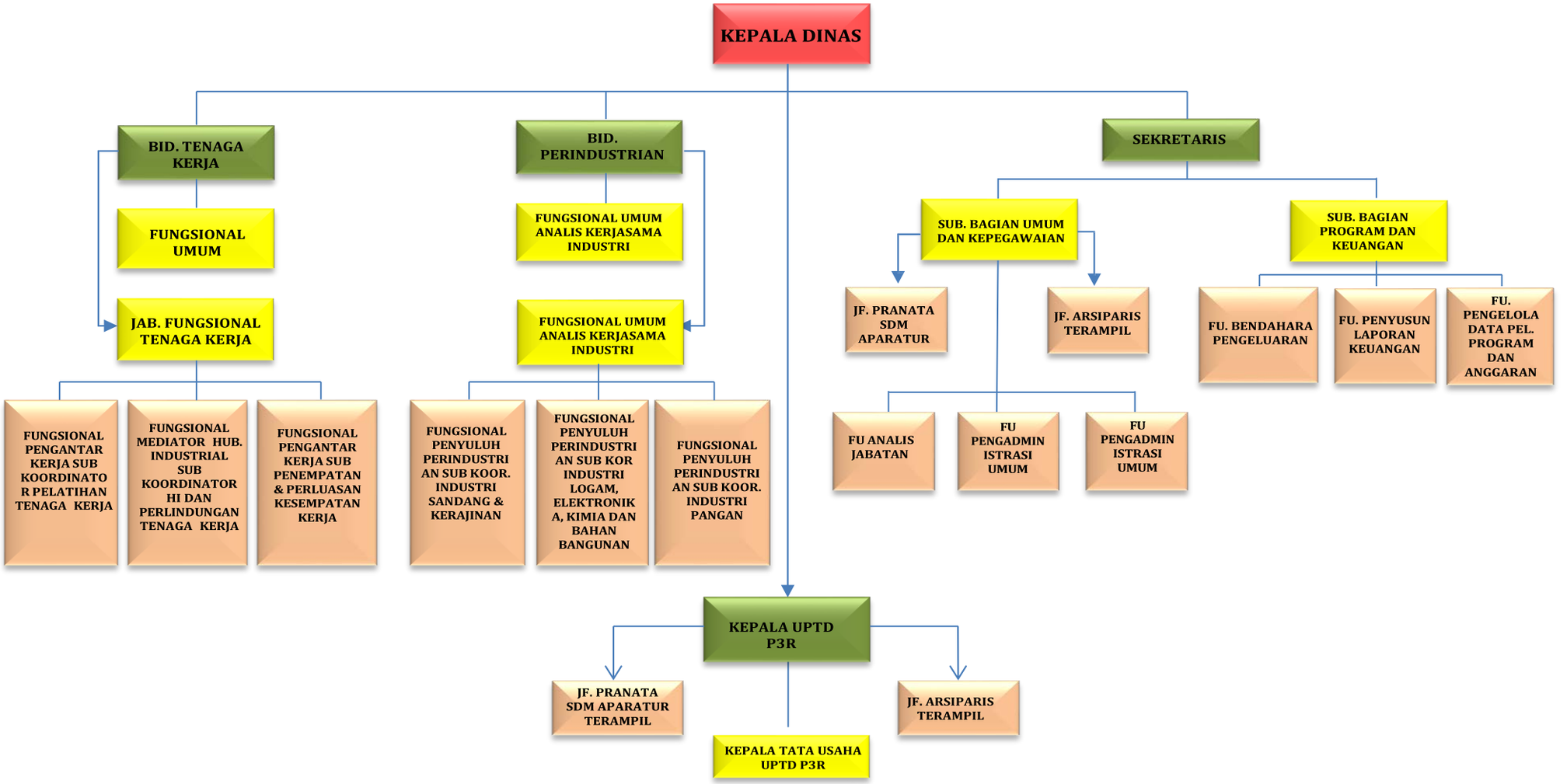
UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) mempunyai :

a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1 Sumber Daya Manusia

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Payakumbuh yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf yang merupakan kesatuan untuk mewujudkan Visi, Misi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

Keadaan Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh berdasarkan dari Tahun 2020-2024 pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Data Kepegawaian Tahun 2020-2024

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Pangkat/Gol	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pembina Utama Muda / IVc	1	1	1	1	1
2	Pembina TK I / IV b	-	1	-	-	-
3	Pembina /IVa	2	3	4	3	2
4	Penata TK I/IIId	6	6	5	5	5
5	Penata/IIIc	5	2	3	2	3
6	Penata Muda TK I/ IIIb	1	4	3	2	3
7	Penata Muda/IIIa	2	1	1	3	3
8	Pengatur TK I /IId	-	1	2	1	1
9	Pengatur /IIc	1	2	1	-	-
10	Pengatur Muda TK I/ II b	1	-	-	-	-
11	PPPK-09	-	-	-	-	1
12	PPPK-07	-	-	-	2	4
	Jumlah	**19**	**21**	**20**	**19**	**23**

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada Tahun 2025 sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan P3K yang terdiri dari 13 (Tiga belas) orang laki-laki dan 11 (Sebelas) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata/jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S-2. Berikut data kepegawaian seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

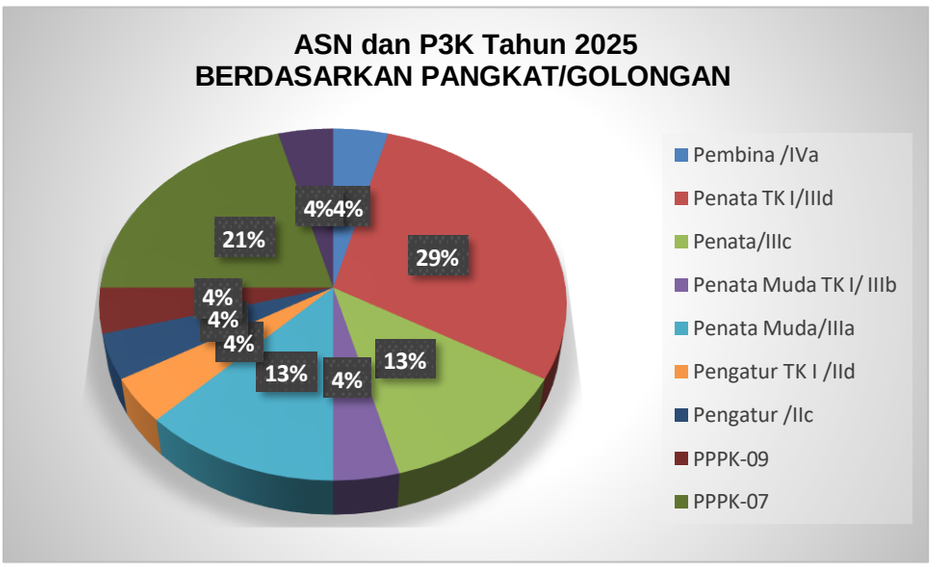
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan P3K

Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Pangkat/Gol	Sekretariat		Bidang Tenaga Kerja		Bidang Perindustrian		UPTD		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Pembina Utama Muda / IVc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembina /IVa	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Penata TK I/IIId	-	2	2	-	1	1	1	-	4	3	7
Penata/IIIc	1	1	-	1	-	-	-	-	1	2	3
Penata Muda TK I/ IIIb	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Penata Muda/IIIa	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	3
Pengatur TK I /IId	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Pengatur /IIc	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
PPPK-09	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
PPPK-07	2	1	-	-	-	-	1	1	3	2	5
PPPK-05	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah	**6**	**7**	**2**	**1**	**2**	**2**	**3**	**1**	**13**	**11**	**24**

Gambar. 2.2



Tabel 2.3

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan P3K

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

Dinas Tenaga Kerjadan Perindustrian Kota Payakumbuh

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Tenaga Kerja		Bidang Perindustrian		UPTD P3R		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S2	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	3
S1	2	4	1	1	2	-	-	-	5	5	10
D4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
D3	2	2	-	-	-	-	2	1	4	3	7
SLTA	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Jumlah	**5**	**8**	**2**	**1**	**2**	**4**	**3**	**1**	**12**	**12**	**24**

Gambar 2.3



Di Tahun 2025 berkurangnya personil/SDM ASN yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, karena pensiun, promosi, tugas belajar, pindah tugas dan sampai sekarang belum ada personil pengganti, sehingga masih kurangnya personil ASN, karena belum terisinya peta jabatan sesuai SOTK, yang berdampak kurang maksimalnya dalam pelaksanaan kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 didukung dengan aspek sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025

Kota Payakumbuh

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
1	Gedung	1	Dinas UPTD Sentra Rendang	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 2	11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9 Baik/2 Rusak Ringan
4	Mesin Absen	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/1 Rusak Ringan
5	Papan visual/papan nama	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik
6	Papan Tulis	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik
7	LCD Projektor/Infocus	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/1 Rusak Berat
8	Papan Gambar	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik
9	Lemari Kayu	11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/7 Rusak Ringan
10	Kursi Besi/Metal	23	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	23 Baik
11	Meja Rapat	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik
12	Meja Resepsionis	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik
13	Kursi Tamu	9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9 Baik

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
14	Kursi Putar	14	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10 Baik/4 Rusak Ringan
15	Kursi Biasa	7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/3 Rusak Ringan
16	Meja Komputer	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Rusak Berat
17	Meja 1/2 Biro	24	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/20 Rusak Ringan
18	Lemari Es	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik
19	AC	8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6 Baik/2 Rusak Ringan
20	Televisi	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/1 Rusak Ringan
21	Sound System	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik/1 Rusak Ringan
22	Wireless	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Rusak Ringan
23	Handy Cam	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Rusak Berat
24	Karpet	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik
25	Alat Pemadam/Portable	14	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	14 Baik
26	P.C Unit	24	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	15 Baik/9 Rusak Ringan
27	Laptop	7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/3 Rusak Berat
28	Note Book	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik/2 Rusak Berat
29	Hard Disk	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/2 Rusak Berat
30	Printer	27	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	18 Baik/6 Rusak Ringan/3 Rusak Berat

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
31	Scanner	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik
32	CCTC-Camera Control Campuran Television System	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik
33	External/Portable Hardisk	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik
34	Camera Video/CCTV	12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12 Rusak Ringan
35	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Rusak Ringan
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Rusak Ringan
37	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Rusak Ringan
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik
40	Kursi Tamu	9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9 Baik
41	Camera Digital	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
42	Digital LED Running Text	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik
43	Sofa	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik
44	Camera Film	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik
45	Filing Cabinet Besi	13	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8 Baik/4 Rusak Ringan/1 Rusak Berat
46	Lemari Besi/Metal	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Rusak Ringan
47	Rak Besi	12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12 Baik

Sumber Data : Buku Invetaris Disnakerperin

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh masih perlu penambahan penunjang pelayanan antara lain kendaraan dinas roda 2 sebanyak 6 (enam) unit dan kendaraan operasional berupa becak motor untuk operasional sebanyak 1 (satu) unit, peralatan dan perlengkapan kantor dan mebel yang belum memadai serta pos jaga alur bahan baku sentra rendang yang perlu pengamanan.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1. Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah 5 (Lima) tahun terakhir

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh periode 2020-2024 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh selama periode tersebut diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis dinas Tahun 2025 - 2029 untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan secara teknokratik ini dapat mencapai tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh secara efektif dan efesien.

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja				-	93,55	93,75	93,75	93,75	-	98,96	94,84	95,16	95,13	-	105,78	101,16	101,50	101,47
2	Persentase Peningkatan Nilai Produksi				2	2,5	3	3	3,25	-13,8	15,3	3,1	5,63	5,99	-690	612	103,33	187,67	184,31
3			Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja		-	100	100	100	100	-	100	100	83,33	100	-	100	100	83,33	100
4			Persentase Tenaga Kerja Bersetifikat Kompetensi		-	3,82	3,98	3,92	3,95	-	33,08	4,92	47,29	47,9	-	865,97	123,62	1.206,38	1212,66
5			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		-	6.350,72	6.350,72	6.350,72	6.350,72	-	6.350,72	6.350,72	6.815,56	70,58	-	100	100	107,32	111,14
6			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB.LKS Bipartit. Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		-	3,23	3,23	3,23	3,23	-	19,05	80	75	49,21	-	589,78	2.476,78	2321,98	1.523,53
7			Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		-	46,24	46,24	46,24	46,24	-	46,24	50,6	51,21	51,53	-	100	109,43	110,75	111,44
8			Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota		-	1,37	1,38	1,5	2	-	1,37	3,73	22,7	1,87	-	100	270,29	1.513,33	93,50
9			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,67	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait		-	10	10	10	10	-	61,4	86,8	44,05	12,99	-	614	868	440,5	129,90
11			Persentase Jumalah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait		-	-	5	5	5	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
12			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini		-	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada

Selama periode 2020-2024, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menunjukkan capaian yang bervariasi terhadap indikator kinerja utama (IKU) di bidang Ketenagakerjaan dan bidang Perindustrian yaitu :

1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja

   Selama periode Tahun 2020 hingga 2024, indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja menunjukkan fluktuasi capaian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal.

   Pada Tahun 2020, tidak ditetapkan target karena situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakpastian di sektor ketenagakerjaan. Namun demikian, realisasi mulai terlihat dari Tahun 2021 dengan target sebesar 93,55% dan realisasi mencapai 98,96%. Capaian sebesar 105,78% ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang cepat pasca pandemi serta efektifnya program-program pemulihan tenaga kerja, seperti pelatihan keterampilan dan fasilitasi penempatan kerja.

   Tahun 2022, capaian sedikit menurun menjadi 94,84% dari target 93,75%, atau setara dengan 101,16%. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh mulai berkurangnya efek stimulus dan bantuan ekonomi, serta masih adanya dampak lanjutan dari pandemi terhadap sektor-sektor informal dan UMKM.

   Pada Tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan realisasi menjadi 95,16% atau 101,50% dari target. Ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi lapangan kerja dan konsistensi pelaksanaan program peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja.

   Tahun 2024 menunjukkan lonjakan signifikan dengan realisasi mencapai 95,13%, atau 101,47% dari target yang ditetapkan. Peningkatan tajam ini dapat dijelaskan oleh beberapa kemungkinan faktor, antara lain: masuknya investasi baru yang menciptakan banyak lapangan kerja, optimalisasi program pelatihan dan penempatan kerja, serta pemulihan penuh dari dampak pandemi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.

   Secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun, tren umum menunjukkan peningkatan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong penyerapan tenaga kerja secara efektif dan adaptif terhadap tantangan eksternal.

2. Persentase Peningkatan Nilai Produksi

   Dalam 5 (Lima) tahun terakhir produktivitas cukup posisitf, walaupun sempat mengalami penurunan yang signifikan pada Tahun 2020 akibat wabah covid 19, namun bisa *rebounce* pada Tahun 2021 dan menunjukkan stabilitas pada tahun-tahun berikutnya bahkan melebihi

target yang telah ditetapkan. Kondisi ini ditopang oleh beberapa faktor seperti Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5% pasca pandemi, pengendalian inflasi dan stabilitas harga yang cukup baik, peningkatan nilai investasi, peningkatan jumlah perusahaan dan tenaga kerja industri.

Sedangkan untuk periode 2020-2024, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menunjukkan capaian terhadap indikator kinerja kunci (IKK) di bidang Ketenagakerjaan dan bidang Perindustrian. Beberapa indikator mencerminkan pencapaian luar biasa, sementara sebagian lain menunjukkan tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan.

1. Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja

   Indikator ini menunjukkan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan perencanaan tenaga kerja. Selama empat tahun terakhir, capaian sangat stabil di angka 100%, kecuali pada Tahun 2022 yang turun menjadi 83,33%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh realokasi anggaran atau penyesuaian kegiatan akibat perubahan kebijakan, namun secara umum konsistensi perencanaan dan pelaksanaan tergolong sangat baik.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersetifikat Kompetensi

   Capaian indikator ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021, realisasi mencapai 33,08% dari target 3,82% (865,97%), sementara di Tahun 2022 dan 2023 melonjak lebih tinggi lagi hingga mencapai 1.206,38% dan 1212,66% pada Tahun 2024. Kenaikan signifikan ini menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan program sertifikasi kompetensi, yang mungkin diperkuat oleh kolaborasi dengan BLK (Balai Latihan Kerja), lembaga sertifikasi profesi, serta peningkatan kesadaran dan kebutuhan dunia industri terhadap tenaga kerja bersertifikat.

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

   Produktivitas tenaga kerja mengalami lonjakan tajam pada Tahun 2024, dengan capaian sebesar 111,14% dibanding target (realisasi 7.058,00 dari target 6.350,72). Peningkatan tajam ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan sektor industri unggulan atau kegiatan ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja secara produktif, seperti UMKM yang bertransformasi digital atau sektor industri rumah tangga. Tahun sebelumnya menunjukkan kestabilan, namun belum ada kenaikan signifikan hingga tahun terakhir.

4. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak

   Indikator ini menunjukkan progresivitas dalam penerapan prinsip kerja layak oleh perusahaan. Pada Tahun 2021 hingga Tahun 2024, capaian meningkat secara drastis, mulai dari 19,05% di Tahun 2021 hingga mencapai 1.523,53% pada Tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa upaya pembinaan dan sosialisasi terhadap perusahaan mengenai kepatuhan terhadap norma kerja, perjanjian kerja bersama (PKB), LKS Bipartit, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan semakin membuahkan hasil yang konkret.

5. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja

   Indikator ini menunjukkan efektivitas layanan penempatan kerja oleh dinas. Selama periode 2021-2024, capaian terus meningkat dari 100% di Tahun 2021 menjadi 111,44% pada Tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa sistem layanan antar kerja telah berjalan optimal, baik dalam penempatan kerja lokal maupun luar negeri. Ini juga mencerminkan sinergi dengan sektor swasta, serta keberhasilan pelatihan berbasis permintaan pasar kerja.

6. Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota

   Pembangunan Industri Kota Payakumbuh dalam 5 (Lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja positif. Hal ini ditandai dengan pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah yang cukup baik.

7. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023 kinerja pengawasan perizinan berusaha sektor industri juga cukup baik dimana jumlah perusahaan industri yang diawasi mengalami peningkatan, tetapi di Tahun 2024 pemantauan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri Yang dikeluarkan oleh instansi terkait adalah 0%. Di karenakan IUI yang dipersyaratkan adalah IUI Besar, sementara Kota Payakumbuh tidak memiliki industri besar dan tidak ada permohonan perizinan yang masuk untuk IUI besar. Industri Besar adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha di atas 10 Milliar Rupiah di luar tanah dan bangunan.

8. Persentase Jumalah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait

   Tidak tersedianya Kawasan Industri di Kota Payakumbuh. Kawasan Industri sendiri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah Kawasan pemusatan kegiatan perindustrian yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Sementara itu, di dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri menyatakan bahwa untuk persyaratan satu Kawasan Industri memiliki minimal 50 Hektar dalam satu hamparan dan syarat tersebut belum bisa dipenuhi oleh Kota Payakumbuh.

9. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini
   Ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan.

2.1.3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja

Keberhasilan pemerintah dalam mencapai sasaran pokok pembangunan di bidang ketenagakerjaan ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran. Dalam pelaksanaannya perubahan dari dua sisi tersebut dapat disiasati dengan menetapkan pilihan strategi kebijakan dan penetapan target-target pembangunan. Perencanaan tenaga kerja selama 5 tahun mendatang secara spesifik, dipengaruhi oleh penetapan beberapa variabel-variabel ekonomi lainnya.

Untuk menyusun program kegiatan ketenagakerjaan maka perlu diketahui data pencapaian bidang ketenagakerjaan antara lain :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
   Angkatan TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Untuk Tahun 2024 terdapat 77.876 orang angkatan kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Angka TPAK dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan demografis, diantaranya jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan. Perkembangan data ketenagakerjaan Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan Data Bidang Tenaga Kerja
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja (Orang)	**69.808**	**74.303**	**73.939**	**77.907**	**77.876**
Bekerja (Orang)	65.144	69.498	70.127	74.137	74.085
Penganggur (Orang)	4.664	4.805	3.812	3.770	3.791
Bukan Angkatan Kerja (Orang)	**31.830**	**29.279**	**31.593**	**30.515**	**32.544**
Sekolah (Orang)	9.734	10.220	9.093	9.796	9.015

Mengurus Rumah Tangga (Orang)	16.937	17.783	18.160	16.037	17.935
Lainnya (Orang)	5.159	1.276	4.340	4.682	5.594
Penduduk Usia Kerja (Orang)	**101.638**	**103.582**	**105.532**	**108.422**	**110.420**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,68	71,73	70,06	71,86	70,53
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	93,32	93,53	94,84	95,16	95,13
Tingkat Penganggur (%)	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87

Sumber Data : Kota Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2025

Terjadinya penurunan jumlah orang yang bekerja dan meningkatnya angka pengangguran di Kota Payakumbuh dari Tahun 2023 ke 2024 dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut adalah analisis mengenai situasi yang terjadi berdasarkan data yang diberikan :

1. Penurunan Jumlah Orang yang Bekerja : Pada Tahun 2023, jumlah orang yang bekerja di Kota Payakumbuh adalah 74.137 orang, dan pada Tahun 2024 turun sedikit menjadi 74.085 orang. Penurunan ini relatif kecil, namun hal ini dapat menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja, seperti :
    a. Penurunan peluang kerja : Bisa jadi terjadi penurunan jumlah lowongan pekerjaan atau kurangnya perkembangan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja baru.
    b. Pemutusan hubungan kerja (PHK) : Mungkin terjadi pemutusan hubungan kerja di beberapa perusahaan, yang menyebabkan beberapa orang kehilangan pekerjaan mereka.
    c. Faktor demografis atau sosial : Misalnya, adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang tidak dapat diserap dalam pasar kerja karena keterbatasan kesempatan kerja.
2. Peningkatan Angka Pengangguran : Angka pengangguran di Tahun 2023 tercatat sebanyak 3.770 orang dan meningkat sedikit menjadi 3.791 orang pada Tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan jumlah yang bekerja, peningkatan angka pengangguran ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pencari kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Penyebabnya bisa meliputi :
    a. Ketidaksesuaian keterampilan dan pekerjaan: Bisa jadi terdapat gap keterampilan antara pekerja yang tersedia dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pasar.
    b. Penurunan permintaan tenaga kerja: Seperti yang disebutkan sebelumnya, penurunan lapangan pekerjaan atau perlambatan dalam sektor-sektor ekonomi tertentu dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran.

3. Penurunan Angkatan Kerja : Angkatan kerja di Tahun 2023 adalah sebanyak 77.907 orang dan pada Tahun 2024 turun sedikit menjadi 77.876 orang. Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan jumlah orang yang aktif mencari pekerjaan, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor :
    a. Pindah ke luar daerah : Mungkin sebagian orang yang sebelumnya mencari pekerjaan di Kota Payakumbuh memilih untuk pindah ke kota atau daerah lain dengan prospek pekerjaan yang lebih baik.
    b. Keputusan untuk tidak melanjutkan pencarian pekerjaan : Beberapa orang mungkin memilih untuk berhenti mencari pekerjaan karena tidak menemukan pekerjaan yang sesuai, atau mungkin mereka memilih untuk tidak bergabung dalam angkatan kerja, seperti memilih untuk melanjutkan pendidikan atau berfokus pada pekerjaan informal.
    c. Emigrasi atau perpindahan penduduk : Beberapa warga bisa saja pindah ke luar daerah karena faktor sosial atau keluarga.
4. Penurunan Tingkat Kesempatan Kerja pada Tahun 2024 menjadi 95,13% dari 95,16% pada Tahun 2023

    Meskipun penurunan ini terbilang sangat kecil (hanya 0,03%), ini tetap mencerminkan adanya sedikit penurunan dalam ketersediaan peluang kerja di Kota Payakumbuh. Penurunan tingkat kesempatan kerja ini bisa dijelaskan oleh beberapa faktor :
    a. Penurunan jumlah lapangan pekerjaan: Seiring dengan penurunan jumlah orang yang bekerja, secara proporsional jumlah kesempatan kerja juga turun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang bekerja berkurang sedikit, tetapi lebih besar dari jumlah penurunan angkatan kerja, yang berarti ada sedikit pengurangan dalam ketersediaan pekerjaan.
    b. Tantangan dalam sektor formal: Jika sektor formal (seperti industri, layanan, dan perdagangan) tidak berkembang atau bahkan mengalami penurunan, maka hal ini akan langsung memengaruhi jumlah kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk.
    c. Perubahan struktur ekonomi: Jika lebih banyak orang bekerja di sektor informal, maka hal ini bisa mengurangi jumlah kesempatan kerja di sektor formal yang tercatat dalam statistik resmi.
5. Dampak Ekonomi dan Sosial :
    a. Ekonomi yang melambat : Secara keseluruhan, penurunan jumlah yang bekerja dan penurunan angkatan kerja ini bisa mencerminkan kondisi perekonomian yang melambat atau kurangnya perkembangan sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal.

b. Keterbatasan peluang usaha : Jika sektor usaha seperti industri, perdagangan, dan sektor formal lainnya tidak berkembang dengan pesat, maka hal ini akan berdampak pada pengurangan jumlah orang yang bekerja.

Secara keseluruhan, penurunan jumlah yang bekerja, kenaikan pengangguran, penurunan angkatan kerja dan penurunan kesempatan kerja bisa disebabkan oleh sejumlah faktor ekonomi, sosial, serta struktur pasar tenaga kerja yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup sesuai dengan jumlah angkatan kerja yang ada.

Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh berdasarkan sasaran/target perubahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7

Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga kerja yang kompeten	orang	20	969	2.204	3.629	4.492
2	Jumlah pencari kerja yang mendapat informasi tenaga kerja	orang	1.572	465	587	289	446
3	Jumlah tenaga kerja yang mendapat BPJS Kesehatan	orang	1.994	2.718	2.729	3.181	3.211
4	Jumlah perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan	perusahaan	110	112	115	118	124
5	Pencari kerja yang ditempatkan	%	65,52	46,24	50,6	51,21	51,53
6	Jumlah sengketa perusahaan	kasus	0	0	0	0	0
7	Kasus yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama	%	80	100	100	75	66,67

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pada Tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang kompeten di Kota Payakumbuh meningkat signifikan, mencapai 4.492 orang, dibandingkan dengan 3.629 orang pada Tahun 2023. Dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang kompeten, diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan membuka lebih banyak peluang kerja di berbagai sektor industri. Hal ini juga mendukung upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas.

Pada Tahun 2024, jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi

mengenai lowongan tenaga kerja di Kota Payakumbuh meningkat signifikan, yaitu menjadi 446 orang, dibandingkan pada Tahun 2023 sebanyak 289 orang . Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak pencari kerja yang memanfaatkan layanan informasi tenaga kerja yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Melalui berbagai program dan platform informasi, diharapkan dapat mempermudah pencari kerja untuk mengakses peluang pekerjaan yang tersedia, serta meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja di kota ini.

Jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan di Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan, yaitu menjadi 3.211 orang, dibandingkan pada Tahun 2023 sebanyak 3.181 orang . Meskipun kenaikan ini terbilang kecil, hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja.

Pada Tahun 2024, jumlah perusahaan di Kota Payakumbuh yang memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya meningkat menjadi 124 perusahaan, dibandingkan pada Tahun 2023 sebanyak 118 perusahaan Kenaikan ini mencerminkan komitmen yang lebih besar dari sektor perusahaan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada tenaga kerja mereka, seiring dengan pentingnya kesehatan bagi produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Kenaikan persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan di Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 disebabkan oleh peningkatan peluang kerja akibat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pelatihan keterampilan yang lebih efektif, dan kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, yang membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Kenaikan persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan di Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 disebabkan oleh peningkatan peluang kerja akibat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pelatihan keterampilan yang lebih efektif, dan kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, yang membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Pada Tahun 2024, persentase kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama di Kota Payakumbuh tercatat sebesar 66,67%, menurun dibandingkan pada Tahun 2023 sebesar 75% . Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas kasus yang lebih tinggi atau kurangnya kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha dalam beberapa masalah. Meskipun demikian, penyelesaian melalui perjanjian bersama tetap menjadi mekanisme yang efektif dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Pelayanan bidang Tenaga Kerja kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun adalah sebagai berikut :

- Memberikan layanan informasi lowongan kerja melalui WA Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, serta rektruitmen terhadap pencari kerja;
- Penyebarluasan informasi pasar kerja dengan menyelenggarakan bursa kerja;
- Melaksanakan penempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Daerah dan Antar Kerja Negara;
- Melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Rata-rata perselisihan masuk/dilaporkan baik oleh pekerja/serikat pekerja maupun dari pihak perusahaan pertahun 3 pelapor dan seluruhnya dapat diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dari capaian kinerja pelayanan yang berdasarkan sasaran dan Tabel 2.8 diatas dapat dilihat bahwa pencapaiannya belum konsisten. Hal itu disebabkan dari tiap indikator kinerja terlihat ada capaian yang mengalami peningkatan dan penurunan. Kondisi capaian yang demikian disebabkan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sekarang tidak lagi direalisasikan pelaksanaan tahun berikutnya, sehingga kinerja pelayanan tidak berkesinambungan.

2.1.3.3. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Perindustrian

Jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Berfluktuasinya perkembangan industri di Kota Payakumbuh karena industri yang berkembang masih banyak yang berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah atau *Home Industry* yang dikelola baik secara formal dan informal, sehingga rentan sekali untuk beralih usaha ke sektor lain jika ditimpa krisis. Industri rumah tangga (*Home Industry*) yang banyak digeluti masyarakat adalah jenis makanan ringan, seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendan runtiah, kerupuk sanjai, karak kaliang dan jenis kerupuk lainnya. Di samping produk-produk kerajinan dan fashion (bordir dan tenun).

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas dan pemasaran produk industri ini antara lain melalui kegiatan pembinaan dengan sasaran kelompok-kelompok yang direalisasikan dengan mendirikan sentra rendang, sentra tenun, sentra makanan ringan dan sentra kerajinan bambu. Ke depan, diharapkan lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian bisa semakin berkembang sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya,

dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usaha industri.

UPTD P3R selaku pelaksana teknis untuk peningkatan industri rendang Kota Payakumbuh mengelola sentra rendang sebagai tempat pengelolaan produksi rendang yang memenuhi standarisasi produksi pangan sehat dan memenuhi pangsa pasar yang lebih spesifik. Sebagai pelaksana produksi dan pemasaran, UPTD P3R saat ini bermitra atau memfasilitasi koperasi Sentra Rendang Payo untuk bekerjasama. Koperasi Sentra Rendang Payo beranggotakan IKM-IKM rendang yang ada di Payakumbuh. Saat ini anggotanya kurang lebih 31 IKM.

Adapun perkembangan usaha industri Kota Payakumbuh didominasi oleh industri non formal dengan skala usaha mikro dan kecil. Perkembangan industri selama kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8

Perkembangan Industri Kota Payakumbuh

Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Unit Usaha	Unit	1.902	1.928	2.000	2.454	2.500
2	Formal	Unit	630	643	905	1.359	1.400
3	Non Formal	Unit	1.272	1.285	1.095	1.095	1.100
4	Tenaga Kerja	Orang	6.271	6.308	6.485	7.549	7.563
5	Nilai Investasi (ribu)	Rp.	95.649.716	95.954.716	87.291.446	94.866.073	100.687.145
6	Nilai Produksi (ribu)	Rp.	257.089.350	296.463.459	269.426.788	284.598.221	301.636.853

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Perkembangan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 cenderung stabil dan relatif mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan jumlah unit usaha sektor industri dan tenaga kerja. Sementara itu, dari sisi Nilai Investasi dan Nilai Produksi juga relatif mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024, dilakukan pendataan industri Tahun 2024 yang melibatkan tenaga pendata dari masing-masing Kelurahan di Kota Payakumbuh, sehingga diperoleh Data Industri Kota Payakumbuh terbaru. Ditemukan industri yang lama sudah tidak aktif melakukan kegiatan, data ganda, pindah domisili, dan KBLI yang tidak sesuai sehingga harus dikeluarkan dari database. Akan tetapi, juga ada IKM baru yang datang dan memberikan kontribusi produktivitas yang lebih baik. Produktivitas industri yang masih stabil dan ada sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya ditopang oleh inflasi kota payakumbuh yang stabil dan bahkan lebih rendah di bawah angka inflasi nasional sebesar 2,51% dan penggunaan teknologi

yang tepat dalam mendukung aktivitas produksi.

Dari segi penyerapan tenaga kerja cukup besar untuk kegiatan industri, di mana dari catatan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, selama Tahun 2021 lapangan usaha industri mampu menyerap tenaga kerja mencapai hampir 6.308 orang yang sebagian besar bergerak di industri mikro dan kecil dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9

Data Industri dan Penggunaan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Jenis Industri	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri pengolahan dan pengawetan daging	13	55	14	56	11	46	41	167	31	140
2	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	5	9	7	9	4	10	2	3	4	25
3	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	9	28	9	30	12	68	24	174	27	185
4	Industri minyak dari kelapa	0	0	-	-	4	4	36	76	1	4
5	Industri susu	2	11	2	11	2	11	5	17	4	7
6	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya	13	19	15	15	18	29	44	90	5	5
7	Industri ransum pakan ternak / ikan	-	-	-	-	-	-	2	9	0	-
8	Industri konsentrat pakan ternak	5	11	5	13	6	16	2	6	0	-
9	Industri roti dan sejenis nya	58	197	59	206	93	313	371	1.070	510	1,172
10	Industri makaroni, mie, spagheti, bihun, soun, dan sejenisnya	5	37	7	47	82	201	-	-	8	19
11	Industri pengolahan teh dan kopi	15	29	15	29	19	39	31	77	15	30
12	Industri es (macam-macam es)	7	17	7	17	7	17	-	-	12	15
13	Industri tempe	3	10	3	10	5	16	21	55	5	32
14	Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe (industri tahu)	53	208	54	208	56	249	31	132	18	100
15	Industri kerupuk dan sejenisnya	399	1,923	402	1.924	391	1.893	564	2.469	480	2,500
16	Industri bumbu masak dan penyedap makanan	42	155	43	156	40	148	12	38	16	25
17	Industri kue basah	248	812	254	823	233	777	107	265	90	286
18	Industri makanan yang belum termasuk kelompok manapun	3	33	81	251	78	207	113	188	283	450
19	Industri minuman ringan (soft drink)	5	24	5	24	11	30	10	52	41	80
20	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	3	33	3	33	2	32	2	32	0	-

No	Jenis Industri	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja
21	Industri pengergajian kayu	9	33	9	33	10	32	-	-	3	36
22	Industri moulding dan komponen bahan bangunan	1	4	1	4	3	9	-	-	13	23
23	Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati	12	32	12	32	11	31	14	37	13	30
24	Industri anyam-anyaman dari bambu dan rotan	114	186	114	186	113	186	116	191	60	89
25	Industri kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture	3	7	3	7	3	7	8	14	3	9
26	Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bamboo	2	2	2	2	-	-	-	-	0	-
27	Industri air minum dalam kemasan	64	152	64	152	59	133	96	181	63	150
28	Industri penggilingan padi	54	140	54	140	49	125	65	173	32	120
29	Industri percetakan	27	116	27	116	42	132	58	122	45	105
30	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	4	6	4	6	9	21	10	22	6	18
31	Industri barang-barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	5	11	5	11	4	7	-	-	0	-
32	Iindustri batu bata dari tanah liat	21	58	21	58	15	42	20	66	4	12
33	Industri kapur	3	5	3	5	2	4	1	1	0	-
34	Industri barang-barang dari semen	93	182	93	182	72	146	75	152	40	145
35	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	1	4	1	4	1	4	2	9	1	3
36	Industri furniture dari kayu	121	410	121	410	108	368	125	442	60	406
37	Industri pemintalan benang	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
38	Industri pertenunan	11	56	11	56	11	56	13	76	5	60
39	Industri barang tekstil jadi kecuali barang jadi	40	132	40	132	46	98	60	127	32	110
40	Industri bordir/sulaman	10	35	10	35	14	48	20	53	18	30
41	Industri kain rajut	11	61	11	61	31	70	59	140	39	100
42	Industri pakaian jadi dari tekstil	123	296	125	298	120	322	110	270	166	280
43	Industri furniture dari logam	18	44	18	44	14	37	23	49	2	14
44	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	18	28	18	27	17	25	2	2	3	15
45	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
46	Industri barang-barang logam bukan aluminium siap pasang	117	276	117	279	109	257	111	267	99	200

No	Jenis Industri	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja
47	Industri alat pertanian dari logam	2	6	3	10	2	6	4	8	1	9
48	Industri alat pertukangan dari logam	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Industri alat alat dapur	6	19	6	19	6	19	-	-	-	-
50	Industri peralatan kantor dari logam tidak termasuk furniture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Industri komponen dan suku cadang motor	1	3	1	3	1	3	4	10	-	-
52	Industri mesin pertanian dan kehutanan	2	7	2	7	2	7	-	-	1	8
53	Industri karoseri kendaran bermotor roda empat atau lebih	3	5	3	5	3	5	6	15	1	2
54	Industri penempaan pengepresan dan penggilingan logam	3	4	3	4	3	4	-	-	-	-
55	Industri mainan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Industri kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun	21	61	21	61	23	73	33	200	25	135
57	Industri pengolahan lainnya yang belum termasuk golongan manapun	11	32	11	32	14	75	-	-	80	115
58	Industri pemeliharaan dan perbaikan elektronik	2	5	2	5	3	8	1	2	6	8
59	Industri jasa reparasi jam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Industri jasa reparasi kendaraan bermotor (mobil)	1	3	1	3	1	3	-	-	40	104
61	Industri bengkel / reparasi sepeda motor	4	10	4	10	4	10	-	-	65	100
62	Industri jasa reparasi kendaraan bukan bermotor (sepeda)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
63	Industri jasa perorangan lainnya	2	7	2	7	1	6	-	-	21	42
64	Industri alat musik tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1.902**	**6.271**	**1.928**	**6.308**	**2.000**	**6.485**	**2.454**	**7.549**	**2,500**	**7,563**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pada Tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan, baik dari sisi jumlah IKM dan Jumlah Tenaga Kerja. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi cukup stabil dimana angka inflasi cukup terkendali.

2.1.4. Kinerja Anggaran Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh didukung dengan anggaran berbasis kinerja, maksudnya adalah setiap unit kerja mengelola anggaran untuk mendanai program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, perkembangan APBD dari Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN TENAGA KERJA	**1.431.822.714**	**3.183.623.602**	**3.604.689.267**	**4.104.663.011**	**4.837.591.516**	**1.181.275.948**	**2.961.008.222**	**3.427.573.132**	**3.567.143.927**	**4.243.150.919**	**82,50%**	**93,01%**	**95,09%**	**86,90%**	**87,71%**	**41,82%**	**47,36%**
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	621.139.295	-	-	-	-	556.199.271	-	-	-	-	89,55%	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	105.853.851	-	-	-	-	105.174.950	-	-	-	-	99,36%	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	17.550.000	-	-	-	-	17.542.000	-	-	-	-	99,95%	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.192.285	-	-	-	-	13.172.725	-	-	-	-	92,82%	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	3.410.900	-	-	-	-	3.296.590	-	-	-	-	96,65%	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	643.326.078	-	-	-	-	459.585.812	-	-	-	-	71,44%	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	26.350.305	-	-	-	-	26.304.600	-	-	-	-	99,83%	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	2.974.277.020	3.254.238.185	3.463.866.791	3.429.976.208	-	2.761.192.981	3.099.486.389	2.962.755.560	2.915.919.783	-	92,84%	95,24%	85,53%	85,01%	4,96%	2,09%
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	-	59.993.776	-	-	-	-	54.923.171	-	-	-	-	91,55%	-	-	-
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	-	73.148.945	210.583.010	440.189.118	1.240.592.100	-	69.729.350	193.582.881	421.169.864	1.170.045.165	-	95,33%	91,93%	95,68%	94,31%	159,58%	157,66%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	114.579.857	119.549.772	112.996.026	139.284.458	-	110.235.391	115.539.182	105.326.682	131.821.968	-	96,21%	96,65%	93,21%	94,64%	7,37%	7,04%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	21.617.780	20.318.300	27.617.300	27.738.750	-	19.850.500	18.964.680	22.968.650	25.364.003	-	91,82%	93,34%	83,17%	91,44%	10,12%	9,03%
URUSAN PERINDUSTRIAN	**1.743.028.810**	**6.200.654.683**	**1.130.993.210**	**1.768.934.759**	**1.806.269.606**	**1.641.091.393**	**2.640.536.121**	**1.079.628.392**	**1.634.839.083**	**1.716.223.162**	**94,15%**	**42,58%**	**95,46%**	**92,42%**	**95,01%**	**58,12%**	**14,55%**
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	93.468.700	-	-	-	-	80.314.950	-	-	-	-	85,93%	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	48.247.000	-	-	-	-	41.677.050	-	-	-	-	86,38%	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	1.601.313.110	-	-	-	-	1.519.099.393	-	-	-	-	94,87%	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	6.163.424.653	1.069.863.440	1.411.096.619	1.665.673.356	-	2.603.701.031	1.019.053.702	1.339.262.304	1.589.019.082	-	42,24%	95,25%	94,91%	95,40%	-10,90%	-3,60%
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	-	37.230.030	61.129.770	357.838.140	61.899.300	-	36.835.090	60.574.690	295.576.779	58.611.695	-	98,94%	99,09%	82,60%	94,69%	155,62%	124,08%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	-	-	78.696.950	-	-	-	-	68.592.385	-	-	-	-	87,16%	-	-
Total Anggaran	**3.174.851.524**	**9.384.278.285**	**4.735.682.477**	**5.873.597.770**	**6.643.861.122**	**2.822.367.341**	**5.601.544.343**	**4.507.201.524**	**5.201.983.010**	**5.959.374.081**	**88,90%**	**59,69%**	**95,18%**	**88,57%**	**89,70%**	**45,80%**	**27,23%**

Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik terjadi pada Tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024 hal ini disebabkan ada 1 (satu) program yang mempunyai persentase realisasi anggaran yang dibawah 75%. Sedangkan pada Tahun 2021 Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik. Hal ini disebabkan ada 1 (satu) program yang persentase realisasi anggarannya kurang dari 50%.

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja merupakan pelaksanaan dengan kinerja yang pengelolaan pendanaan pelayanan yang sangat baik dengan realisasi rata-rata di atas 94,78%. Begitu juga dengan pelaksanaan program belanja langsung pokok yang berada di Sekretariat Dinas. Faktor yang mempengaruhi sangat baiknya pengelolaan pendanaan pelayanan pada program ini adalah program-program tersebut membutuhkan anggaran yang besar sedangkan dengan keterbatasan kemampuan APBD, kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut akan dimaksimalkan penggunaannya oleh pelaksana program.

Namun, juga terdapat program dengan kinerja yang pengelolaan pendanaan pelayanan yang kurang baik yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, di mana realisasi program ini di bawah rata-rata 90%. Hal pokok yang dilaksanakan pada program ini adalah Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan pendukung produksi dengan target sebanyak 10 paket pekerjaan (9 paket kontruksi sentra IKM rendang dan 1 pengadaan mobiler Galeri) dan terealisasi sebanyak 7 paket (6 paket kontruksi sentra IKM rendang dan 1 penggadaan mobiler Galeri) dengan capaian 70%, sehingga dalam penanganannya program secara prosedur pelaksanaan kegiatan ini sudah dilakukan proses pengadaan, adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan mesin operasional dan penggadaan alat promosi yang tidak bisa dipenuhi pada Tahun anggaran 2021 pada sentra IKM rendang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Item barang yang tidak dapat terpenuhi oleh pihak ketiga.
b. Spek teknis pemenang tender tidak sesuai dengan yang ditawarkan.
c. Dokumen asli pemenang belum lengkap.
d. Barang yang tersedia dipasaran mengalami lonjakan harga.

Solusi :

a. Paket pekerjaan/item pekerjaan lebih disederhanakan.
b. Proses lelang/tender lebih awal.
c. Perencanaan pekerjaan yang lebih matang.

Permasalahan pendanaan pelayanan yakni keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh membuat anggaran yang ada harus digunakan secara maksimal. Keterbatasan anggaran tersebut meliputi beberapa hal yakni :

1) Penambahan sarana dan prasarana aparatur;

2) Penambahan jumlah dan kualitas personil (Sumber Daya Manusia);
3) Peningkatan kapasitas aparatur;
4) Pelaksanaan program pada Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Perindustrian.

2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Perindustrian mencakup berbagai elemen masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan. Secara umum, kelompok sasaran tersebut meliputi :

Urusan Tenaga Kerja

a. Siswa SMK yang akan tamat sekolah di berikan sosialisasi tentang kesempatan dan peluang kerja ke Luar Negeri;
b. Pencari kerja yang ber KTP Kota Payakumbuh yang akan mengurus Kartu Pencari Kerja (AK1);
c. Warga Kota Payakumbuh yang mengikuti pelatihan keterampilan berbasis komptensi untuk membuka usaha sendiri atau bekerja dengan Perusahaan;
d. Tenaga Kerja yang berselisih dengan Perusahaan pemberi kerja;
e. Perusahaan yang berselisih dengan Pekerja.

Urusan Perindustrian

a. Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) : Merupakan tulang punggung sektor industri di Kota Payakumbuh, termasuk pengrajin, UMKM berbasis pengolahan pangan, sandang dan kerajinan, dan logam-elektronika-bahan bangunan;
b. Kelompok Usaha Bersama (Kube) : Merupakan kelompok yang terdiri dari minimal 5 IKM dengan jenis usaha yang sama. Masyarakat yang baru merintis usaha industri dan membutuhkan pendampingan, pelatihan, serta akses permodalan;
c. Sentra industri : merupakan kawasan atau wilayah yang menjadi pusat kegiatan industri, di mana terdapat pelaku usaha industri yang bergerak di bidang sejenis atau saling mendukung satu sama lain;
d. Pelaku IKM Rendang/Koperasi yang membutuhkan fasilitasi produksi, pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk;
e. Siswa TK – SD – SMP – SMA/SMK/Mahasiswa sebagai bagian dari edukasi budaya lokal melalui School of Randang;
f. Masyarakat umum atau wisatawan sebagai penikmat wisata gastronomi melalui program Marandang Day.

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Pelaksanaan program dan layanan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian tidak dapat berjalan optimal tanpa kolaborasi dengan

berbagai mitra kerja strategis. Beberapa mitra yang terlibat antara lain :

Urusan Tenaga Kerja

a. Mall Pelayanan Publik di Balaikota sebagai tempat stand untuk pelayanan kartu pencari kerja (AK1);
b. BP3MI Sumbar dalam hal pemberangkatan CPMI ke Luar Negeri;
c. Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Sumbar dalam pengawasan Perusahaan;
d. BPJS Ketenagakerjaan.

Urusan Perindustrian

a. **Dinas dan Instansi Terkait** di tingkat kota maupun provinsi, seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, BPOM, LPPOM MUI, Pendamping Proses Produk Halal (PPH), Kemenkumham RI Wilayah Sumbar;
b. **Organisasi Industri :** Seperti Dekranasda, IWAPI, IPEMI;
c. **Lembaga Keuangan** : Bank dan lembaga pembiayaan mikro yang memberikan akses permodalan kepada pelaku IKM;
d. **Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi** : Seperti BSPJI, BLK, Balai Diklat Industri, LSP, yang berperan dalam peningkatan kompetensi SDM industri.
e. **Perguruan Tinggi** : Dalam pengembangan inovasi produk, teknologi tepat guna seperti UNP, Unand, ISI dan ATIP;
f. **Asosiasi Industri** : Sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha seperti KADIN dan APINDO;
g. Komunitas Pengusaha Rendang atau Koperasi Sentra Rendang Payo sebagai pelaku bisnis pada Sentra IKM Rendang;
h. BPOM, Dinas Lingkungan Hidup serta lembaga sertifikasi sebagai penjamin keamanan pangan (rendang);
i. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam program School of Randang, dimana program Marandang menjadi kurikulum di sekolah TK-SD-SMP dan SMA/SMK;
j. Kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk pengembangan wisata gastronomi dalam program Marandang Day.

2.1.7. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Perangkat Daerah

Peran BUMD dalam mendukung kinerja sektor perindustrian cukup signifikan. Beberapa bentuk kontribusi BUMD antara lain :

a. Penyediaan Air Bersih bagi pelaku industri (PDAM Kota Payakumbuh);
b. Dukungan permodalan usaha bagi IKM melalui program/dana CSR Bank, Lembaga pembiayaan, Baznaz, dan PDAM Kota Payakumbuh.

2.1.8. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

a. Kerja sama produksi rendang dan Pemanfaatan Sentra IKM Rendang dengan Koperasi Sentra Rendang Payo;
b. Kerjasama pembangunan SDM Industri Rendang dengan Universitas Negeri Padang.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan didasarkan pada analisis masa lalu dan masa yang akan datang. Analisis masa lalu digunakan untuk menggambarkan permasalahan pembangunan dan analisis masa datang untuk mendapatkan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan daerah mencakup berbagai aspek yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah secara merata. Dimana permasalahan pembangunan daerah memberikan gambaran mengenai suatu kondisi atau keadaan yang memiliki perbedaan antara kondisi aktual dengan kondisi yang di inginkan. Kondisi aktual dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah tahun sebelumnya sehingga akan menghasilkan gap atau perbedaan antara kinerja yang dihasilkan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan dimasa datang. Hasil evaluasi terhadap kondisi daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas, sasaran pembangunan dan isu strategis daerah yang harus diselesaikan dalam 5 (Lima) tahun kedepan dalam periode Tahun 2025-2029. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

2.2.1. Permasalahan

1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah :

1. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang;

2. Kondisi yang menjadi isu strategis
   adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai tugas dan tantangan berat di masa depan. Sebagai institusi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengurangan pengangguran, perannya diharapkan menjadi optimal.

Banyaknya tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi, situasi perekonomian yang mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap bidang ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran maka perlu dilakukan iklim investasi yang kondusif yang akan bisa membuka dan memperluas lapangan pekejaan.

Sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional umum merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Namun disadari, bahwa kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan ditambah sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu, di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumuh juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian. Tetapi secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tersebut belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Peran dan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK), LPK-LPK yang ada di Kota Payakumbuh dan Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas (BBPVP) yang ada di Indonesia, diharapkan lebih optimal lagi dalam rangka mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Para pencari kerja yang belum memiliki keterampilan dan kurang

berkompetensi di dunia kerja masih cukup tinggi. Ke depan Balai Latihan Kerja (BLK), LPK-LPK dan Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas (BBPVP), diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pelatihan tetapi juga sebagai lembaga sertifikasi dan penempatan (Three in one). Persoalan data seringkali menjadi kendala dalam merencanakan program, kegiatan dan kebijakan. Data belum tersaji secara sempurna, efektif dan melembaga. Kesulitan dalam mencari data yang akurat sampai tingkat kelurahan menjadi persoalan tersendiri. Pada akhirnya penyerapan tenaga kerja menurun/berkurang dan pengangguran masih relatif tinggi, apalagi kalau yang dibicarakan adalah kelompok setengah penganggur.

Begitu juga peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sentra Rendang dan Sentra Tenun Balai Panjang diharapkan lebih optimal lagi dalam rangka meningkatkan produksi industri pengolahan.

2. Permasalahan Urusan Tenaga Kerja

1. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja, yang antara lain disebabkan oleh :
    1) Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja;
    2) Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik yang tidak memiliki kompetensi;
    3) Masih belum memadainya kapasitas wirausaha untuk pengembangan usaha.
2. Masih rendahnya daya saing pencari kerja, yang disebabkan oleh :
    1) Masih rendahnya kompetensi pencari kerja siap pakai sesuai kebutuhan pasar kerja;
    2) Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja.
3. Ketersedian lapangan kerja yang terbatas, yang disebabkan oleh :
    1) Masih rendahnya wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyedian lapangan kerja;
    2) Terbatasnya ketersedian lapangan kerja sektor formal;
    3) Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja dalam daerah, luar daerah dan luar negeri.
4. Masih belum optimalnya upaya perlindungan tenaga kerja, yang disebabkan oleh :
    1) Masih rendahnya kesadaran pemahaman akan kewajiban mendaftarkan lowongan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
    2) Belum meratanya perlindungan tenaga kerja (terutama hak-hak tenaga kerja, jaminan kesehatan/keselamatan kerja, proteksi);
    3) Masih adanya hubungan kerja yang kurang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja;

4) Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan oleh pekerja dan pemberi kerja.

3. Permasalahan Urusan Perindustrian

1. Masih rendahnya ketersedian bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Masih rendahnya penguasaan teknologi industri, disebabkan oleh :
   1) Masih rendahnya kompetensi SDM sektor industri;
   2) IKM tidak memiliki rencana pengembangan SDM dan sering terjebak di zona nyaman;
3. Rendahnya kualitas produk industri, disebabkan oleh :
   1) Tidak menerapkan SOP Produksi secara konsisten;
   2) Kualitas bahan baku yang kurang baik;
   3) Kualitas kemasan yang belum baik.
4. Masih rendahnya standardisasi produk industri, disebabkan oleh :
   1) Masih rendahnya pemahaman IKM akan pentingnya standardisasi produk;
   2) IKM belum memiliki Sistem Manajemen Usaha yang baik;
   3) Komitmen IKM masih rendah dalam menjaga tata kelola usaha yang memenuhi standar industri.

4. Permasalahan Lingkungan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD adalah proses analisis sistematis yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS berfungsi sebagai alat bantu dalam perencanaan pembangunan daerah agar Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang disusun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Kota Payakumbuh dalam KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai berikut :

1) Permasalahan berdasarkan hasil konsultasi Publik :
   a. Belum optimalnya pengelolaan sampah;
   b. Penurunan kualitas air;
   c. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi.
2) Permasalahan berdasarkan analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) :
   a. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak;
   b. Masih adanya ketimpangan kesetaraan gender;
   c. Belum maksimalnya fungsi kemitraan untuk mencapai tujuan;

d. Infrastruktur, industri dan inovasi.

3) Permasalahan berdasarkan karakteristik wilayah :
   a. Masih tingginya angka kemiskinan;
   b. Belum adanya lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah;
   c. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender;
   d. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender;
   e. Masih tingginya Indeks Ketimpangan Gender;
   f. Belum adanya insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri;
   g. Belum adanya kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air;
   h. Masih rendahnya Laju Pertumbuhan Ekonomi;
   i. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja pada sektor industri manufaktur;
   j. Belum optimalnya capaian kinerja pengelolaan sampah;
   k. Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan;
   l. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3;
   m. Belum adanya skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

4) Permasalahan berdasarkan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) dan KLSH RTRW :
   a. Pengelolaan persampahan;
   b. Penurunan kualitas dan kuantitas air;
   c. Pengelolaan limbah cair.

2.2.2. Isu Strategis

Identifikasi Isu Strategis

Identifikasi isu strategis lingkungan dalam Rencana Strategis (Renstra) harus mempertimbangkan keterkaitan antara isu global, nasional, dan regional. Dengan memahami permasalahan lingkungan pada berbagai tingkatan, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan nasional serta komitmen global terhadap pelestarian lingkungan. Isu-isu ini dapat memengaruhi pembangunan daerah secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu dianalisis secara komprehensif agar kebijakan yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 mampu menjawab tantangan yang ada.

Dengan mengacu pada isu lingkungan dinamis pemerintah daerah dapat menyusun isu strategis lingkungan yang relevan, berbasis data, serta sesuai dengan perkembangan dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah

dalam Rencana Strategis (Renstra) lebih responsif, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan yang lebih luas.

Rumusan Isu Strategis

1. Masih tingginya angka pengangguran

   Peningkatan Angka Pengangguran : Angka pengangguran di Tahun 2023 tercatat sebanyak 3.770 orang dan meningkat sedikit menjadi 3.791 orang pada Tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan jumlah yang bekerja, peningkatan angka pengangguran ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pencari kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Penyebabnya bisa meliputi :

   - **Rendahnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor formal maupun informal**, disebabkan terbatasnya lapangan kerja baru dan belum optimalnya investasi yang menciptakan pekerjaan.
   - **Ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja** (mismatch), terutama di kalangan lulusan pendidikan formal yang tidak dibekali keterampilan praktis.
   - **Kurangnya jumlah wirausahawan baru**, sehingga peluang kerja mandiri sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja belum berkembang secara signifikan.
   - Kurangnya kesadaran perusahaan dalam melaporkan lowongan kerja ke Dinas Tenaga Kerja.
   - **Belum maksimalnya jejaring kerja sama antar daerah dan ke luar negeri** untuk penempatan tenaga kerja, yang seharusnya dapat membantu mengurangi beban pengangguran lokal.
   - **Dampak sisa dari pandemi dan perubahan struktur ekonomi**, yang membuat beberapa sektor mengalami perlambatan dan mengurangi kemampuan menyerap tenaga kerja.

2. Masih rendahnya pertumbuhan sektor industri

   Pertumbuhan sektor industry ditandai dengan meningkatnya produktifitas sektor industri dalam menghasilkan produk-produk industri. Secara nasional, produksi Industri di Indonesia rata-rata mencapai 3,36% dari Tahun 2011 hingga Tahun 2024 dan dalam 5 tahun terakhir 2.2% (Diolah dari berbagai sumber BPS, trading economics.com dan ceicdata.com). Sementara, rata-rata Pertumbuhan Produksi Industri Kota Payakumbuh dalam 5 tahun terakhir adalah -1,4%, walaupun pada Tahun 2024 cukup baik tumbuh di angka 6%, di atas rata-rata nasional yaitu 2,13%.

   Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas IKM Kota Payakumbuh masih rendah dan pertumbuhan sektor industri Kota Payakumbuh belum cukup baik.

Berdasarkan hasil analisa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat pada tabel 2.11, maka dapat diidentifikasi isu strategis urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka pengangguran;
2. Masih rendahnya pertumbuhan sektor industry;
3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.11

Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA						
1. Sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di Payakumbuh antara lain : sektor jasa, perdagangan dan pertanian 2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan cenderung meningkat setiap tahunnya	1. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja 2. Masih rendahnya daya saing pencari kerja 3. Ketersedian lapangan kerja yang terbatas 4. Masih belum optimalnya upaya perlindungan tenaga kerja	Berdasarkan Analisa capaian TPB 1. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak (Analisa capaian TPB) Berdasarkan karakteristik wilayah 2) Masih rendahnya jumlah pekerja industri pariwisata 3) Masih rendahnya jumlah tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	**Tujuan 8 TPB :** Meningkatkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	**Prioritas Nasional 3 :** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi **Prioritas Nasional 4 :** Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas Dengan arah kebijakan: Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	**Misi 4 Sasaran 2 RPJMD Prop. Sumbar :** Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Masih tingginya angka pengangguran
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN						
1. Nilai produksi sektor industry cenderung meningkat dari tahun ke tahun 2. Kota Payakumbuh telah menerapkan OVOP sejak Tahun 2005	1. Masih rendahnya ketersedian bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan 2. Masih rendahnya penguasaan teknologi industri 3. Rendahnya kualitas produk industri 2. 4. Masih rendahnya standardisasi produk industri	-	**TPB 9 sasaran 2 :** Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 203O, secara signilikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto. **TPB 9 sasaran 3 :** Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	**Prioritas Nasional 3 :** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	**Misi 4 sasarn 1 RPJMD Prop Sumbar :** Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Masih rendahnya pertumbuhan sektor industri

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteran masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

3.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan :

1. Diturunkan secara operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis;
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

”Menurunnya pengangguran melalui peningkatan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja serta daya saing industri”.

3.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat melaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis;
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Dengan mengacu pada tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja;
2. Meningkatnya daya saing industri;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,75	4,64	4,52	4,43	4,33	4,26
2		Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	95,25	95,36	95,48	95,57	95,67	95,74
3			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	70,8	71,5	72,02	73,3	74,03	75
4		Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	6	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9
5			Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	4,95	5,06	5,17	5,31	5,43	5,55
6		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	84,5	85	85,25	85,5	85,75	86

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Dengan kata lain strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang bersifat operasional. Secara sederhana, perumusan strategi dapat memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah agar diperoleh strategi yang lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan. Sebagaimana kertas kerja Penatahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh terlampir.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Penatahapan Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan dasar kapasitas tenaga kerja dan layanan ketenagakerjaan melalui: 1) Peningkatan akses pelatihan berbasis kompetensi melalui BLK dan kemitraan; 2) Peningkatan kualitas data dan informasi pasar kerja; 3) Sosialisasi norma ketenagakerjaan dan perluasanpemahaman hak-hak pekerja/pemberi kerja; 4) Peningkatan pendataan dan lowongan kerja melalui sistem AKAD/Job Fair lokal. Updating data industri dan Peningkatan keahlian/keterampilan SDM Industri melalui :	Penguatan program penempatan tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan melalui: 1) Fasilitasi penempatan kerja dalam dan luar negeri; 2) Pengembangan jejaring kerja sama antar daerah dan lembaga penempatan; 3) Pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan bagi calon wirausaha baru; 4) Integrasi sistem pelaporan lowongan kerja dan	Pemantapan kualitas tenaga kerja dan hubungan industrial melalui: 1) Peningkatan jumlah tenaga kerja tersertifikasi; 2) Pembentukan lebih banyak Lembaga Kerja Sama Bipartit dan peningkatan kesadaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB); 3) Pendampingan dan peningkatan kapasitas usaha mikro untuk menyerap tenaga kerja; 4) Evaluasi dan pemutakhiran sistem informasi ketenagakerjaan berbasis elektronik. Peningkatan penerapan	Penguatan daya saing tenaga kerja daerah dengan fokus pada: 1) Penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri lokal dan nasional; 2) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui program vokasional lanjutan; 3) Mendorong perluasan wirausaha berbasis teknologi; 4)	Pemenuhan target pembangunan ketenagakerjaan menuju masyarakat mandiri dan berdaya saing, melalui: 1) Optimalisasi penempatan tenaga kerja tersertifikasi ke dalam dan luar negeri; 2) Terwujudnya sistem layanan ketenagakerjaan berbasis digital yang terintegrasi; 3) Terciptanya ekosistem wirausaha produktif dan inklusif; 4) Capaian indikator

Pelatihan / workshop	pengembangan aplikasi layanan ketenagakerjaan. Penguatan Kelembagaan Sentra-Sentra IKM melalui : Pelatihan; Pendampingan dan Monitoring.	standardisasi mutu produk industry.	Peningkatan efektivitas pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Peningkatan pemanfaatan teknologi terutama sekali teknologi tepat guna dalam pelaksanaan poduksi.	ketenagakerjaan (penyerapan, sertifikasi, produktivitas, hubungan industrial) mendukung visi Payakumbuh sejahtera dan religius. Peningkatan pengawasan dan pelaporan perusahaan industry.

Untuk mencapai sasaran pada Tujuan 2 dan 3 (Mendorong terciptanya keadilan social ekonomi masyarakat dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui percepatan sektor strategis) pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, maka strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah :

1. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Meningkatkan Upaya Penyerapan Tenaga Kerja;
3. Mendorong Peningkatan Produktivitas Industri;
4. Meningkatkan Daya Saing Produk Industri.

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra. Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalisasikan pilihan strategi hingga memiliki fokus sesuai waktu pelaksanaannya. Sementara penekanan tema/fokus pembangunan setiap tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ditetapkan berdasarkan capaian sasaran pembangunan jangka menengah periode sebelumnya agar terdapat kesinambungan dalam pencapaian tujuan jangka panjang daerah.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan 5 (Lima) tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra dapat di lihat pada tabel 3.3.

Untuk mencapai sasaran pada Tujuan 1 (Mendorong terciptanya keadilan social ekonomi masyarakat dan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui percepatan sektor strategis) pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, diperlukan arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan arah kebijakan yang dipilih pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar;
2. Mengembangkan Program Pelatihan Keterampilan dan Pendidikan Vokasi bagi Masyarakat Pencari Kerja;
3. Mengembangkan/Fasilitasi Program Magang, Pelatihan Industri dan Sertifikat keahlian bagi Tamatan Sekolah Kejuruan dan Pencari Kerja;
4. Memperkuat Kerjasama, Kemitraan dan Pemanfaatan Teknologi Untuk Menyerap dan/atau Menciptakan Lapangan Kerja Baru;
5. Mengembangkan Kluster Industry dan Inkubasi Bisnis dalam Penciptaan Pengusaha Baru;
6. Meningkatkan Kualitas SDM Entrepreneur melalui Pemberdayaan, Pendampingan serta Pendidikan Formal dan Informal;
7. Penguatan Kelembagaan Sentra-Sentra Industri;
8. Penguatan Infrastruktur Pendukung Industri;
9. Mendorong Pengembangan Layanan Usaha, Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Kemudahan Akses Pembiayaan Usaha;
10. Mendorong Tumbuhnya Industri Manufaktur;
11. Peningkatan Kualitas Pendataan dan Pengawasan Industri;
12. Peningkatan Keahlian dan Keterampilan bagi Pelaku Industri Kecil;
13. Meningkatnya Penerapan Standarisasi Usaha dan Produk;
14. Penguatan dan Penerapan Industri Halal dan Sertifikasi Halal;
15. Fasilitasi Pemasaran dan Promosi Produk.

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1.	Meningkatkan kualitas dan produktivitas Tenaga kerja	1. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar; 2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi bagi masyarakat; 3. Menyiapkan program magang, pelatihan industri dan sertifikat keahlian bagi tamatan sekolah kejuruan.	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar; 2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi bagi masyarakat/pencari kerja; 3. Mengembangkan/fasilitasi program magang, pelatihan industri dan sertifikat keahlian bagi tamatan sekolah kejuruan dan pencari kerja.	
2.	Meningkatkan upaya penyerapan tenaga kerja	1. Memperkuat kerjasama, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap dan/atau menciptakan lapangan kerja baru; 2. Mengembangkan kluster industry dan inkubasi bisnis dalam penciptaan pengusaha baru 3. Meningkatkan kualitas SDM entrepreneur melalui pemberdayaan, pendampingan serta pendidikan formal dan informal;	1. Memperkuat kerjasama, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap dan/atau menciptakan lapangan kerja baru 2. Mengembangkan kluster industry dan inkubasi bisnis dalam penciptaan pengusaha baru; 3. Meningkatkan kualitas SDM entrepreneur melalui pemberdayaan, pendampingan serta pendidikan formal dan informal.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
3.	Mendorong peningkatan produktivitas industri	1. Mendorong bertumbuhnya industri dari hulu ke hilir 2. Penguatan kelembagaan sentra-sentra industri; 3. Penguatan infrastruktur pendukung industry; 4. Mendorong pengembangan layanan usaha, pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan kemudahan akses pembiayaan usaha; 5. Peningkatan kualitas pendataan dan pengawasan industry.	1. Penguatan kelembagaan sentra-sentra industri; 2. Penguatan infrastruktur pendukung industri; 3. Mendorong pengembangan layanan usaha, pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan kemudahan akses pembiayaan usaha; 4. Mendorong tumbuhnya industry manufaktur; 5. Peningkatan kualitas pendataan dan pengawasan industri; 6. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil.	
4.	Meningkatkan daya saing produk industry	1. Meningkatnya industri halal dan standarisasi produk sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah.	1. Meningkatnya penerapan standarisasi usaha dan produk; 2. Penguatan dan penerapan industri halal dan sertifikasi halal; 3. Fasilitasi Pemasaran dan Promosi Produk.	

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagaimana tabel pada tabel 3.4.

Tabel 3.4

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

VISI : PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF			
MISI 2 : MEWUJUDKAN IKLIM EKONOMI YANG KOMPETITIF			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan kualitas dan produktivitas Tenaga kerja	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar
			Mengembangkan Program Pelatihan Keterampilan dan Pendidikan Vokasi bagi Masyarakat Pencari Kerja
			Mengembangkan/Fasilitasi Program Magang, Pelatihan Industri dan Sertifikat keahlian bagi Tamatan Sekolah Kejuruan dan Pencari Kerja
		Meningkatnya Upaya Penyerapan Tenaga Kerja	Memperkuat Kerjasama, Kemitraan dan Pemanfaatan Teknologi Untuk Menyerap dan/atau Menciptakan Lapangan Kerja Baru
			Mengembangkan Kluster Industry dan Inkubasi Bisnis dalam Penciptaan Pengusaha Baru
			Meningkatkan Kualitas SDM Entrepreneur melalui Pemberdayaan, Pendampingan serta Pendidikan Formal dan Informal
	Meningkatnya Daya Saing Industri	Mendorong Peningkatan Produktivitas Industri	Penguatan Kelembagaan Sentra-Sentra Industri
			Penguatan Infrastruktur Pendukung Industri
			Mendorong Pengembangan Layanan Usaha, Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Kemudahan Akses Pembiayaan Usaha

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penguatan Infrastruktur Pendukung Industri
			Mendorong Pengembangan Layanan Usaha, Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Kemudahan Akses Pembiayaan Usaha
			Mendorong Tumbuhnya Industri Manufaktur
			Peningkatan Kualitas Pendataan dan Pengawasan Industri
			Peningkatan Keahlian dan Keterampilan bagi Pelaku Industri Kecil
		Meningkatkan Daya Saing Produk Industri	Meningkatnya Penerapan Standarisasi Usaha dan Produk
			Penguatan dan Penerapan Industri Halal dan Sertifikasi Halal
			Fasilitasi Pemasaran dan Promosi Produk

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Penyusunan program pembangunan bidang tenaga kerja dan perindustrian akan terus berlanjut dan di prioritaskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun kedepan, sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan beberapa kali melalui Keputusan Mendagri, Terakhir Keputusan Kemendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Sebagaimana dapat dilihat pada teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra pada tabel 4.1.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, tentunya perlu dukungan dan kerjasama antara OPD terkait, khusus untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Tenaga Kerja dan Perindustrian kerjasama yang harmonis antar daerah akan membantu menyelesaikan permasalahan Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Seluruh rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.07.3.31.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian							
- Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal - Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Menurunnya Pengangguran Melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)		
					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)		
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah		Nilai IKM (Indeks)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi	2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.07.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.07.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase ketersediaan BMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja		Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersedia (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
				Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Persentase Perusahaaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
				Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		Meningkatnya daya saing industri			Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)		
					Persentase Peningkatan Nilai Produksi (%)		
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah		Nilai IKM (Indeks)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.07.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.07.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase ketersediaan BMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri nasional		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
2.07.3.31.0.00.02.0001 - UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)							
- Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal - Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Menurunnya Pengangguran Melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		Meningkatnya daya saing industri			Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)		
					Persentase Peningkatan Nilai Produksi (%)		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.933.963.446,00		10.010.347.529,00		10.283.835.273,00		10.135.180.155,00		10.482.206.002,00		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.755.942.927,00		6.685.230.838,00		6.854.395.993,00		6.684.126.559,00		6.881.803.046,00		
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	88,25	92,50	4.755.942.927,00	93,00	6.685.230.838,00	93,30	6.854.395.993,00	93,50	6.684.126.559,00	93,70	6.881.803.046,00	2.07.3.31.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				97.644.400,00		216.130.113,00		227.743.125,00		225.517.436,00		254.871.424,00		
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		104	97.644.400,00	104	216.130.113,00	104	227.743.125,00	104	225.517.436,00	104	254.871.424,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24.822.800,00		35.879.888,00		39.467.877,00		43.414.664,00		53.348.097,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	24.822.800,00	4	35.879.888,00	4	39.467.877,00	4	43.414.664,00	4	53.348.097,00		
2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				67.966.800,00		80.250.225,00		88.275.248,00		97.102.772,00		116.523.327,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	67.966.800,00	12	80.250.225,00	12	88.275.248,00	12	97.102.772,00	12	116.523.327,00		
2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.244.800,00		50.000.000,00		50.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		1	3.244.800,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.07.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.610.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		104	1.610.000,00	104	50.000.000,00	104	50.000.000,00	104	50.000.000,00	104	50.000.000,00		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.318.260.087,00		4.211.715.428,00		4.203.715.428,00		4.195.715.428,00		4.196.686.987,00		
Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	26	3.318.260.087,00	26	4.211.715.428,00	26	4.203.715.428,00	26	4.195.715.428,00	26	4.196.686.987,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.054.681.487,00		3.917.136.828,00		3.917.136.828,00		3.917.136.828,00		3.917.136.828,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	26	3.054.681.487,00	26	3.917.136.828,00	26	3.917.136.828,00	26	3.917.136.828,00	26	3.917.136.828,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				263.578.600,00		294.578.600,00		286.578.600,00		278.578.600,00		279.550.159,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	263.578.600,00	1	294.578.600,00	1	286.578.600,00	1	278.578.600,00	1	279.550.159,00		
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				53.567.800,00		45.760.000,00		50.336.000,00		55.369.600,00		66.443.520,00		
Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	12	58	53.567.800,00	26	45.760.000,00	26	50.336.000,00	26	55.369.600,00	26	66.443.520,00		
2.07.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				53.567.800,00		45.760.000,00		50.336.000,00		55.369.600,00		66.443.520,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	12	58	53.567.800,00	26	45.760.000,00	26	50.336.000,00	26	55.369.600,00	26	66.443.520,00		
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				263.544.050,00		565.533.445,00		617.112.790,00		675.322.069,00		793.014.029,00		
Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	263.544.050,00	3	565.533.445,00	3	617.112.790,00	3	675.322.069,00	3	793.014.029,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	15		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60	59		55		55		55		55			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	3		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	15		38		38		38		38			
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.088.500,00		6.500.100,00		6.160.110,00		6.776.121,00		8.131.345,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	5.088.500,00	5	6.500.100,00	5	6.160.110,00	5	6.776.121,00	5	8.131.345,00		
2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.849.300,00		33.746.900,00		37.121.590,00		40.833.749,00		49.000.499,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3	13.849.300,00	7	33.746.900,00	7	37.121.590,00	7	40.833.749,00	7	49.000.499,00		
2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				37.802.300,00		85.742.580,00		94.316.838,00		103.746.522,00		114.123.374,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	15	37.802.300,00	38	85.742.580,00	38	94.316.838,00	38	103.746.522,00	38	114.123.374,00		
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				43.632.000,00		39.085.200,00		42.993.720,00		47.293.092,00		56.751.710,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60	59	43.632.000,00	55	39.085.200,00	55	42.993.720,00	55	47.293.092,00	55	56.751.710,00		
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.605.600,00		25.226.685,00		27.749.354,00		30.524.289,00		36.629.147,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	3	14.605.600,00	7	25.226.685,00	7	27.749.354,00	7	30.524.289,00	7	36.629.147,00		
2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.966.300,00		9.390.700,00		10.329.770,00		11.362.747,00		13.635.296,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	5.966.300,00	3	9.390.700,00	3	10.329.770,00	3	11.362.747,00	3	13.635.296,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.159.050,00		14.908.410,00		16.399.251,00		18.039.176,00		21.647.011,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	1	6.159.050,00	1	14.908.410,00	1	16.399.251,00	1	18.039.176,00	1	21.647.011,00		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				134.831.000,00		315.492.870,00		347.042.157,00		381.746.373,00		458.095.647,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	15	134.831.000,00	30	315.492.870,00	30	347.042.157,00	30	381.746.373,00	30	458.095.647,00		
2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.610.000,00		35.440.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	1.610.000,00	1	35.440.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				117.679.950,00		497.223.260,00		584.984.586,00		338.320.145,00		363.152.159,00		
Persentase ketersediaan BMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	117.679.950,00	2	497.223.260,00	2	584.984.586,00	2	338.320.145,00	2	363.152.159,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	5		13		13		13		13			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)				1									
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2		3		1		2		2			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)						1							
2.07.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0,00	1	10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				64.438.000,00		282.000.000,00		259.239.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	64.438.000,00	3	282.000.000,00	1	259.239.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00		
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	60.500.000,00	2	66.550.000,00		
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.241.950,00		155.223.260,00		170.745.586,00		187.820.145,00		206.602.159,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	5	53.241.950,00	13	155.223.260,00	13	170.745.586,00	13	187.820.145,00	13	206.602.159,00		
2.07.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00	1	100.000.000,00		0,00		0,00		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				682.837.480,00		764.218.792,00		766.589.284,00		773.473.623,00		769.934.851,00		
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	3	682.837.480,00	3	764.218.792,00	3	766.589.284,00	3	773.473.623,00	3	769.934.851,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.903.900,00		229.750.257,00		241.625.283,00		255.487.811,00		266.036.592,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	3	180.903.900,00	3	229.750.257,00	3	241.625.283,00	3	255.487.811,00	3	266.036.592,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				501.933.580,00		534.468.535,00		524.964.001,00		517.985.812,00		503.898.259,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	501.933.580,00	12	534.468.535,00	12	524.964.001,00	12	517.985.812,00	12	503.898.259,00		
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				222.409.160,00		384.649.800,00		403.914.780,00		420.408.258,00		437.700.076,00		
Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	5	222.409.160,00	12	384.649.800,00	12	403.914.780,00	12	420.408.258,00	12	437.700.076,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	38		54		54		54		54			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	17		15		16		16		16			
2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.190.000,00		78.245.000,00		78.769.500,00		72.166.450,00		64.383.065,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	39.190.000,00	1	78.245.000,00	1	78.769.500,00	1	72.166.450,00	1	64.383.065,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				85.600.000,00		94.160.000,00		103.576.000,00		113.933.600,00		125.326.960,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	17	85.600.000,00	15	94.160.000,00	16	103.576.000,00	16	113.933.600,00	16	125.326.960,00		
2.07.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				400.000,00		43.414.800,00		47.756.280,00		52.531.908,00		63.036.290,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	5	400.000,00	12	43.414.800,00	12	47.756.280,00	12	52.531.908,00	12	63.036.290,00		
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.159.160,00		49.830.000,00		54.813.000,00		60.294.300,00		66.323.730,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	38	27.159.160,00	54	49.830.000,00	54	54.813.000,00	54	60.294.300,00	54	66.323.730,00		
2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.060.000,00		119.000.000,00		119.000.000,00		121.482.000,00		118.630.031,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	70.060.000,00	1	119.000.000,00	1	119.000.000,00	1	121.482.000,00	1	118.630.031,00		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				100.000.000,00		160.000.000,00		140.066.920,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersedia (%)	25	25	100.000.000,00	50	160.000.000,00	50	140.066.920,00	75	25.000.000,00	75	25.000.000,00	2.07.3.31.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				100.000.000,00		160.000.000,00		140.066.920,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	0	100.000.000,00	10	160.000.000,00	10	140.066.920,00	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	1		1		1		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				100.000.000,00		150.000.000,00		130.027.320,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	130.027.320,00	0	0,00	0	0,00		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				0,00		10.000.000,00		10.039.600,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	0	0,00	10	10.000.000,00	10	10.039.600,00	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				538.983.824,00		1.718.912.461,00		1.810.803.707,00		1.911.884.078,00		2.023.072.486,00		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	47,90	3,87	538.983.824,00	3,88	1.718.912.461,00	3,88	1.810.803.707,00	3,89	1.911.884.078,00	3,90	2.023.072.486,00	2.07.3.31.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				507.350.299,00		1.687.277.761,00		1.779.169.007,00		1.880.249.378,00		1.991.437.786,00		
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	240	80	507.350.299,00	112	1.687.277.761,00	112	1.779.169.007,00	112	1.880.249.378,00	112	1.991.437.786,00		
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				507.350.299,00		1.687.277.761,00		1.779.169.007,00		1.880.249.378,00		1.991.437.786,00		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	240	80	507.350.299,00	112	1.687.277.761,00	112	1.779.169.007,00	112	1.880.249.378,00	112	1.991.437.786,00		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				31.633.525,00		31.634.700,00		31.634.700,00		31.634.700,00		31.634.700,00		
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	12	12	31.633.525,00	12	31.634.700,00	12	31.634.700,00	12	31.634.700,00	12	31.634.700,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				31.633.525,00		31.634.700,00		31.634.700,00		31.634.700,00		31.634.700,00		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	12	12	31.633.525,00	12	31.634.700,00	12	31.634.700,00	12	31.634.700,00	12	31.634.700,00		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				156.095.245,00		290.080.705,00		319.088.776,00		350.997.653,00		385.097.419,00		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	16,33	16,73	156.095.245,00	16,93	290.080.705,00	17,13	319.088.776,00	17,33	350.997.653,00	17,53	385.097.419,00	2.07.3.31.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				97.501.800,00		97.501.800,00		97.501.800,00		97.501.800,00		97.501.800,00		
Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	370	270	97.501.800,00	200	97.501.800,00	200	97.501.800,00	200	97.501.800,00	200	97.501.800,00		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				97.501.800,00		97.501.800,00		97.501.800,00		97.501.800,00		97.501.800,00		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	370	270	97.501.800,00	200	97.501.800,00	200	97.501.800,00	200	97.501.800,00	200	97.501.800,00		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				58.593.445,00		192.578.905,00		221.586.976,00		253.495.853,00		287.595.619,00		
Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)			58.593.445,00	30	192.578.905,00	30	221.586.976,00	30	253.495.853,00	30	287.595.619,00		
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	196	250		150		150		150		150			
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				58.593.445,00		61.094.020,00		61.094.020,00		61.094.020,00		61.094.020,00		
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	196	250	58.593.445,00	150	61.094.020,00	150	61.094.020,00	150	61.094.020,00	150	61.094.020,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				0,00		131.484.885,00		160.492.956,00		192.401.833,00		226.501.599,00		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)			0,00	30	131.484.885,00	30	160.492.956,00	30	192.401.833,00	30	226.501.599,00		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				382.941.450,00		1.156.123.525,00		1.159.479.877,00		1.163.171.865,00		1.167.233.051,00		
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	1.404	1.444	382.941.450,00	1.464	1.156.123.525,00	1.484	1.159.479.877,00	1.504	1.163.171.865,00	1.524	1.167.233.051,00	2.07.3.31.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		4.771.325,00		6.407.582,00		10.099.570,00		14.160.756,00		
Persentase Perusahaaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	0	0	0,00	2	4.771.325,00	2	6.407.582,00	2	10.099.570,00	2	14.160.756,00		
	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	0	0		2		2		2		2			
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				0,00		2.385.663,00		3.203.791,00		5.049.785,00		7.080.378,00		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	0	0	0,00	2	2.385.663,00	2	3.203.791,00	2	5.049.785,00	2	7.080.378,00		
2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan				0,00		2.385.662,00		3.203.791,00		5.049.785,00		7.080.378,00		
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	0	0	0,00	2	2.385.662,00	2	3.203.791,00	2	5.049.785,00	2	7.080.378,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				382.941.450,00		1.151.352.200,00		1.153.072.295,00		1.153.072.295,00		1.153.072.295,00		
Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	3	3	382.941.450,00	3	1.151.352.200,00	3	1.153.072.295,00	3	1.153.072.295,00	3	1.153.072.295,00		
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	7	7		7		7		7		7			
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)		1.593		3.750		3.750		3.750		3.750			
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				24.591.100,00		24.591.300,00		26.311.395,00		26.311.395,00		26.311.395,00		
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	7	7	24.591.100,00	7	24.591.300,00	7	26.311.395,00	7	26.311.395,00	7	26.311.395,00		
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.200.600,00		4.200.900,00		4.200.900,00		4.200.900,00		4.200.900,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	3	3	4.200.600,00	3	4.200.900,00	3	4.200.900,00	3	4.200.900,00	3	4.200.900,00		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				354.149.750,00		1.122.560.000,00		1.122.560.000,00		1.122.560.000,00		1.122.560.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)		1.593	354.149.750,00	3.750	1.122.560.000,00	3.750	1.122.560.000,00	3.750	1.122.560.000,00	3.750	1.122.560.000,00		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				797.227.815,00		2.280.759.855,00		2.654.900.192,00		2.004.121.386,00		2.203.231.967,00		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				719.630.190,00		2.113.255.285,00		2.451.098.782,00		1.862.209.751,00		2.048.752.457,00		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	25	26	719.630.190,00	27	2.113.255.285,00	28	2.451.098.782,00	29	1.862.209.751,00	30	2.048.752.457,00	2.07.3.31.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				510.705.640,00		1.101.691.113,00		1.409.952.179,00		887.958.902,00		989.700.792,00		
Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	1	510.705.640,00	1	1.101.691.113,00	1	1.409.952.179,00	1	887.958.902,00	1	989.700.792,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				25.647.025,00		63.212.085,00		85.776.820,00		33.341.555,00		35.906.290,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	1	25.647.025,00	1	63.212.085,00	1	85.776.820,00	1	33.341.555,00	1	35.906.290,00		
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				164.534.826,00		356.560.640,00		431.560.640,00		276.560.640,00		321.506.640,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1	164.534.826,00	1	356.560.640,00	1	431.560.640,00	1	276.560.640,00	1	321.506.640,00		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				309.693.639,00		660.924.608,00		870.537.909,00		563.977.317,00		617.125.442,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1	309.693.639,00	1	660.924.608,00	1	870.537.909,00	1	563.977.317,00	1	617.125.442,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				10.830.150,00		20.993.780,00		22.076.810,00		14.079.390,00		15.162.420,00		
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	1	10.830.150,00	1	20.993.780,00	1	22.076.810,00	1	14.079.390,00	1	15.162.420,00		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	25	26	719.630.190,00	27	2.113.255.285,00	28	2.451.098.782,00	29	1.862.209.751,00	30	2.048.752.457,00	2.07.3.31.0.00.02.0001 - UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				208.924.550,00		1.011.564.172,00		1.041.146.603,00		974.250.849,00		1.059.051.665,00		
Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	1	208.924.550,00	1	1.011.564.172,00	1	1.041.146.603,00	1	974.250.849,00	1	1.059.051.665,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				63.252.750,00		150.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1	63.252.750,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	180.000.000,00	1	185.000.000,00		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				145.671.800,00		861.564.172,00		866.146.603,00		794.250.849,00		874.051.665,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	1	145.671.800,00	1	861.564.172,00	1	866.146.603,00	1	794.250.849,00	1	874.051.665,00		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				60.657.325,00		117.313.670,00		148.610.510,00		96.911.635,00		108.479.510,00		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	72,07	72,57	60.657.325,00	72,77	117.313.670,00	73,02	148.610.510,00	73,27	96.911.635,00	73,52	108.479.510,00	2.07.3.31.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				60.657.325,00		117.313.670,00		148.610.510,00		96.911.635,00		108.479.510,00		
Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	60.657.325,00	1	117.313.670,00	1	148.610.510,00	1	96.911.635,00	1	108.479.510,00		
	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)													
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				11.725.950,00		29.768.390,00		31.768.390,00		25.792.090,00		29.792.090,00		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	11.725.950,00	1	29.768.390,00	1	31.768.390,00	1	25.792.090,00	1	29.792.090,00		
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				48.931.375,00		87.545.280,00		116.842.120,00		71.119.545,00		78.687.420,00		
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor	1	1	48.931.375,00	1	87.545.280,00	1	116.842.120,00	1	71.119.545,00	1	78.687.420,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)													
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				16.940.300,00		50.190.900,00		55.190.900,00		45.000.000,00		46.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	0	61,67	16.940.300,00	66,67	50.190.900,00	71,67	55.190.900,00	72,33	45.000.000,00	73,33	46.000.000,00	2.07.3.31.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				16.940.300,00		50.190.900,00		55.190.900,00		45.000.000,00		46.000.000,00		
Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1	1	16.940.300,00	1	50.190.900,00	1	55.190.900,00	1	45.000.000,00	1	46.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				7.958.850,00		18.593.361,00		21.331.762,00		17.634.653,00		15.898.119,00		
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	0	1	7.958.850,00	1	18.593.361,00	1	21.331.762,00	1	17.634.653,00	1	15.898.119,00		
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				8.981.450,00		31.597.539,00		33.859.138,00		27.365.347,00		30.101.881,00		
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1	1	8.981.450,00	1	31.597.539,00	1	33.859.138,00	1	27.365.347,00	1	30.101.881,00		

Menentukan sub kegiatan prioritas yang dituangkan pada tabel 4.3 daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.07.3.31.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian				
1.	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
3.	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
4.	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	

4.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran Tahunan RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai.

Hasil penetapan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.07.3.31.0.00.02.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian									
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,87	4,75	4,64	4,52	4,43	4,33	4,26	
3.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	4,82	4,95	5,06	5,17	5,31	5,43	5,55	
4.	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Nilai	84,25	84,50	85,00	85,25	85,50	85,75	86,00	
5.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	70,58	70,80	71,50	72,02	73,3	74,03	75	
6.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	5,99	6,00	6,10	6,30	6,50	6,70	6,90	
7.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	95,13	95,25	95,36	95,48	95,57	95,67	95,74	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	positif	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	70,58	70,80	71,50	72,02	73,3	74,03	75	
3.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	positif	%	47,90	3,87	3,87	3,88	3,88	3,89	3,90	
4.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	positif	%	49,21	50,00	50,79	51,59	52,38	53,17	53,97	
6.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	positif	%	16,33	16,53	16,73	16,93	17,13	17,33	17,53	
7.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
8.	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	positif	Persentase	0	60	61,67	66,67	71,67	72,33	73,33	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
9.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait	positif	%	12,99	13,5	13,7	13,9	14,5	15	15,5	
10.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang di tetapkan dalam RPIK		%	67,67	69	70	71	72	73	74	
11.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	positif	%	1,87	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	
12.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	positif	%	0	0	0	30	40	50	60	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Lainnya

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	19,96	31,38	33,78	36,18	38,58	40,98	43,39	
2	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	55,63	79,09	79,67	80,25	80,82	81,4	81,98	
3	Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	53,73	53,81	54,38	55,58	56,78	57,98	61,66	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60,51	63,89	64	64,2	64,6	64,9	65,21	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,53	71	71,02	71,04	71,06	71,08	71,1	
6	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Fasilitasi Layanan Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan /atau dari Dinas yang Menangani Ketenagakerjaan	Orang	3	5	15	25	35	37	40	
7	Jumlah Unit Layanan Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten/Kota	Unit	1	1	1	1	1	1	1	
8	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja DI Sektor Formal	%	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	
9	Proporsi Jumlah IKM	%	1,85	3,43	3,51	3,59	3,66	3,74	3,82	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh selama kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang terhitung dari pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh. Dokumen ini memuat berbagai program dan isu strategis yang akan dijalankan selama 5 (Lima) tahun, disertai dengan metode pencapaian dan strategi pelaksanaannya untuk memenuhi sasaran dengan terpadu dan searah dengan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Payakumbuh. Untuk menjamin pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, maka diperlukan penjabaran secara teknis dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Sedangkan untuk penjabaran tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan teknisnya pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) secara sinergi dan berkesinambungan.

1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

   Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan krusial dalam proses pembangunan daerah. Pengendalian berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta target yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana program atau kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai keberhasilan atau mengalami hambatan, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang.

   Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilaksanakan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan perencanaan pembangunan daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Dalam kapasitasnya, Bappeda berperan sebagai koordinator lintas perangkat daerah untuk menjamin keselarasan antara perencanaan strategis dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

   Mempedomani Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah. Disebutkan juga bahwa pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara efisien dan efektif.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah juga bertujuan untuk mewujudkan konsistensi untuk kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional, konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah, konsistensi antara RKPD dan RPJMD, keselarasan RPJMD dengan Renstra dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pada aspek pengendalian, Bappeda bertugas memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan target dan arah kebijakan yang telah dirumuska. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap capaian target kinerja secara triwulanan, semesteran, maupun tahunan, serta melalui analisis realisasi fisik dan keuangan. Bappeda juga berperan dalam memberikan peringatan dini apabila ditemukan deviasi atau penyimpangan dari rencana awal, serta mengarahkan kebijakan agar tetap fokus pada prioritas pembangunan daerah.

Pada fungsi evaluasi, Bappeda menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Renstra berdasarkan indikator kinerja daerah, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD). Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan. Selain itu, evaluasi juga menjadi acuan untuk penyesuaian kebijakan atau perubahan Renstra, Perubahan Renstra tidak hanya didasarkan atas hasil evaluasi, namun dapat dilakukan perubahan apabila ada perubahan signifikan yang disebabkan bencana atau kebijakan nasional baru.

2. Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antar jenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan program/kegiatan prioritas selalu bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif untuk mengarahkan dan mengendalikan kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional diwujudkan melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Sistem Pengelolaan Risiko merupakan upaya untuk membangun budaya risiko yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan untuk memperkuat serta menunjang efektifitas penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah daerah.

Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan yang melekat pada pelaksanaan kegiatannya. Tidak hanya mempersiapkan ketidakberhasilan pencapaian target, pengelolaan risiko juga diperuntukkan untuk pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan pembangunan. Pengelolaan risiko ini dilaksanakan melalui :

1. Pengembangan budaya sadar risiko;
2. Pembentukan struktur pengelolaan risiko;
3. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko;
4. Pengendalian risiko kecurangan.

Guna mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, maka Wali Kota membentuk komite pengelolaan risiko yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah. Proses pengelolaan risiko ini nantinya dikenal dengan Unit Pemilik Risiko (UPR) yang berjenjang dari UPR tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, Eselon III sampai dengan Eselon IV. Pengelolaan Risiko dalam prosesnya merupakan sesuatu yang strategis yang melekat pada proses perencanaan pembangunan daerah. Karena itu untuk Perencanaan Pembangunan daerah Strategis 5 tahunan, pada dokumen RPJMD disusun daftar risiko strategis di tingkat tujuan strategis yang nantinya akan didukung dengan dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 (lima) tahunan.

3. Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah merupakan upaya strategis untuk mewujudkan data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah maupun masyarakat. Di tingkat daerah, Satu Data Indonesia menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan berbasis data, perencanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah dan walidata, memiliki tanggung jawab penting dalam menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Secara hukum, implementasi Satu Data Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menghasilkan dan menyampaikan data sesuai dengan prinsip satu data, yakni: standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi serta data induk yang terstandar. Dijelaskan juga bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggaraan satu data tingkat kabupaten/ kota, Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, walidata pendukung dan produsen data tingkat daerah dan Pembina Data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah serta Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pembina Data bertugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaran SDI di Kota Payakumbuh diampu oleh Badan Pusat Statistik (BPS), walidata bertugas memeriksa kesesuaian data dari produsen data, menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI, dan membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika). Walidata Pendukung bertugas membantu walidata yang berada di Perangkat Daerah (Produsen Data) serta merupakan salah satu unit kerja yang mengkordinir data Perangkat Daerah (melekat pada subbag program dan perencanaan Perangkat Daerah) dan Produsen data bertugas untuk memberikan masukan kepada pembina data, menghasilkan data sesuai Prinsip SDI, menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat Daerah (Perangkat Daerah /bidang-bidang di Perangkat Daerah).

Regulasi pendukung lainnya di samping Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, adalah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengamanatkan pemanfaatan data dan informasi secara sistematis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. SIPD menjadi salah satu platform penguatan integrasi data antar sektor dan lintas perangkat daerah. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah atau Surat Keputusan sebagai payung hukum teknis untuk membentuk Forum Satu Data Daerah, menetapkan Walidata, dan menyusun rencana aksi implementasi SDI. Melalui tata kelola yang

baik, Satu Data Indonesia di tingkat daerah mendorong terciptanya ekosistem data yang mendukung keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mempercepat transformasi digital pemerintahan. Oleh karena itu, komitmen kepala daerah, kesiapan kelembagaan, SDM, serta infrastruktur data sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan SDI secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Badan perencanaan pembangunan daerah membentuk Forum Data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh. Dimana Bappeda sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat kota Payakumbuh yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan dan penerbitan regulasi Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Konteks implementasi kebijakan SDI, data prioritas merupakan komponen penting yang harus dikelola secara konsisten, akurat, dan terpadu. Data prioritas adalah jenis data yang dianggap strategis dan krusial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dalam peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 144 disebutkan bahwa data dan informasi pembangunan terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Didalam data prioritas juga dijelaskan tentang indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, indikator kinerja kunci dan indikator kinerja program yang digunakan untuk mengevaluasi capaian pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan.

Pemanfaatan sistem pengendalian yang terstruktur dan evaluasi yang berbasis kinerja membuat Pemerintah Kota Payakumbuh dapat secara berkala menilai konsistensi, efektivitas, serta efisiensi pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi yang komprehensif menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan tahunan dan perbaikan pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat.

Pengendalian dan evaluasi juga menjadi refleksi terhadap komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Melalui proses ini, arah pembangunan daerah diharapkan dapat senantiasa adaptif terhadap dinamika dan tantangan yang berkembang, sehingga visi pembangunan Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, dan berdaya saing dapat dicapai secara berkelanjutan.

Pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan membutuhkan peran aktif seluruh stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan Kota Payakumbuh dalam membangun kota dan masyarakatnya akan tercermin pada SDM masyarakat yang berkualitas, iklim ekonomi kota yang kompetitif, tata kelola pemerintahan yang profesional, nuansa hidup yang beriman dan berbudaya yang terwujudkan dan sarana perkotaan yang humanis dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Payakumbuh sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah untuk **"Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif".** Serta untuk tercapainya tujuan dari Rentra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 yaitu : **"Menurunnya Pengangguran Melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja Serta Daya Saing Industry".**